

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masuknya barang impor yang tidak terdaftar pada saat terjadinya impor barang, menyebabkan terjadinya kecurangan penerimaan kas atas bea masuk. Berdasarkan UUD 1945 alinea IV yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah dalam hal ini. Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan kegiatan di mana tujuannya menghimpun dana untuk mengisi kas negara. Peraturan perundang undangan yang di dalamnya menjunjung tinggi setiap anggota, mengandung asas keadilan, menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk (Hayati dan Nst, 2017).

Berdasarkan peraturan direktur jenderal nomor PER-46/BC/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memiliki sistem pengendalian intern terhadap kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi secara dini peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (Cukai, 2011, dalam Syafira, 2020).

Pengendalian internal merupakan suatu proses dalam suatu organisasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu dengan melibatkan sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh pengendalian internal yang baik. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk sektor komersial maupun sektor publik atau sektor pemerintah dengan tujuan masing-masing sektor. Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang terdiri dari kebijakan dan proses yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Selain itu, pengendalian yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah bagi para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang

merugikan perusahaan dan menguntungkan mereka sendiri. Semakin efektif pengendalian intern maka semakin dapat dicegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan (Arens, 2008).

Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan (Hartadi, 1990). Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian ini berlaku bagi perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyadi, 2016).

Lembaga Bea Cukai mempunyai dua istilah pengertian yang berbeda. Bea Cukai memiliki dua kata yaitu Bea dan Cukai. Bea adalah suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor dan impor, sedangkan pengertian dari Cukai sendiri merupakan pungutan suatu barang yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Namun bila disatukan, Bea Cukai merupakan tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara

“nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoeren en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Menurut Hirman dan Pratama (2018) menyatakan kurangnya pengendalian akses dan pengawasan yaitu pengolahan data induk pegawai di KPU BC Tipe C Soekarno Hatta sehingga dapat terjadi timbulnya risiko karena adanya data induk pegawai yang digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas belum diperbaharui dan kegagalan dalam melakukan transfer dana ke rekening pelaksana SPD karena nomer rekening sudah tidak aktif atau ditutup oleh bank dan adanya kekeliruan dari sisi pencatatan transaksi piutang dan kurangnya ketelitian pada pengelola piutang perpajakan pada laporan keuangan pemerintah pusat.

Menurut Alfani dan Firmansyah (2018), Suprayitno dan Husodo (2017) menyatakan adanya kelemahan pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi yaitu karena memakai sistem instalasi sehingga jika

aplikasi yang dipakai mempunyai *update* terbaru maka *update* tersebut harus diinstall di setiap komputer dan menghabiskan waktu yang lama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi dan belum adanya format dan aplikasi khusus untuk pengelolaan premi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Alfani dan Firmansyah (2018) dan Suprayitno dan Husodo (2017) menyatakan adanya kelemahan pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi yaitu karena memakai sistem instalasi sehingga jika aplikasi yang dipakai mempunyai *update* terbaru maka *update* tersebut harus diinstall di setiap komputer pada Kantor Pengawasan Bea Cukai.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk** (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kab Bengkalis)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kab Bengkalis?
2. Apakah penerapan kegiatan pengendalian internal terhadap bea masuk yang diterapkan perusahaan telah berjalan efektif?
3. Apakah kendala dalam melakukan sistem pengendalian internal?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kab Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis siklus penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kab Bengkulu
2. Untuk mengidentifikasi penerapan kegiatan pengendalian internal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kab Bengkulu
3. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan sistem pengendalian internal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kab Bengkulu

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna kepada peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh kuliah tentang pengendalian internal.
2. Bagi akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian Sistem Pengendalian Internal.
3. Bagi perusahaan
Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal pada penerimaan Bea Masuk yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Bengkulu dan sebagai bahan pendukung keputusan bahwa penilaian usaha sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Bengkulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan penelitian terdahulu pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.